

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas

Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh berbagai pakar memiliki banyak kesamaan pendapat dan versi. Efektivitas dapat dikatakan sebagai unsur yang penting dalam penerapan program agar tercapainya tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam bahasa Inggris, efektivitas disebut dengan *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan atau dibuat berhasil dengan baik. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian efektivitas:

Siagian dalam Indrawijaya (2010,175), memberikan penjelasan bahwa dinilai baik tidaknya suatu pelaksanaan tugas dilihat dari proses pelaksanaannya dan juga biaya yang digunakan. Pernyataan tersebut cenderung mengandung efektivitas dalam tingkat efisiensi (Indrawijaya 2010,176). Lain halnya dengan pendapat Robbins dalam Indrawijaya (2010,175), bahwa “Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi berdasarkan tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan mencerminkan kontribusi strategis, tingkat kehidupan organisasi, dan minat mengevaluasi”. Lebih lanjut menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010,175), mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai. Tingkat efektivitas semakin tinggi dipengaruhi oleh besarnya target yang dicapai”. Pada umumnya orientasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas. Menurut pendapat P.Robbins Stephen

(2010,8) efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran.

Dari beberapa gagasan para ahli tentang efektivitas, dapat diketahui bahwa konsep efektivitas sendiri beraneka ragam sesuai dengan masing-masing ilmu yang dimiliki. Walaupun memiliki tujuan efektivitas yaitu agar tujuan dapat tercapai.

2.1.1. Mengukur efektivitas

Organisasi bukanlah suatu hal yang amat sederhana, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang serta tergantung pada siapa yang menafsirkan dan menilainya. Bila dilihat dari sudut produktivitas, bahwa seorang manajer produksi menyampaikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kuantitas dan kualitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga bias diukur dengan menilai antara rencana yang sudah ditentukan oleh hasil nyata yang sudah diwujudkan. Namun, jika usaha maupun hasil pekerjaan serta tindakan yang dilakukan tidak akurat sehingga mengakibatkan tujuan tidak tercapai maupun sasaran yang diharapkan, sehingga hal itu dikatakan tidaklah efektif.

Menurut beberapa ahli, ada jenis pendekatan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi. Pendekatan-pendekatan penting dikemukakan untuk digunakan sebagai dasar pengukuran efektivitas. Secara eksplisit, Robbin yang dikutip Indrawijaya (2010,177), menjelaskan ada empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*). Pendekatan yang memandang bahwa keefektifan suatu organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*), keseimbangan caranya (*means*).
- b. Pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan guna meningkatkan eksistensi suatu organisasi, sehingga yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu SDM, struktural organisasi serta pemanfaatan teknologi.
- c. Pendekatan konstituensi strategis (*strategic constituencies approach*). Pada pendekatan ini, agar suatu organisasi dapat melangsungkan kehidupannya, maka diperlukan dukungan terus menerus.
- d. Pendekatan yang nilai-nilai yang bersaing (*competing value approach*). Pendekatan ini adalah gabungan dari ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan pada suatu kelompok nilai.

Pandangan George Poulus dan Tannenbaum dalam Indrawijaya (2010,197-188), menjelaskan bahwa suatu pendekatan yang diperoleh lebih dipertanggungjawabkan, seperti yang diajukan oleh para peneliti, adalah suatu sistem pengukuran efektivitas yang menerapkan beberapa unsur yang biasa diperoleh dalam kehidupan organisasi yang efektif.

Hasil studi menunjukkan adanya 13 penggunaan 3 unsur, yakni produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan stress (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern). Stress mengemukakan kriteria pengukuran efektivitas dalam Musthofa (2015,17) yaitu :

- a. Produktivitas

- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlababa
- e. Pencarian sumber daya

2.1.2. Konsep Efektivitas Program

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan dari awal program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program.

Efektivitas dalam program kesejahteraan masyarakat, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran program yang telah ditetapkan. Persoalan efektivitas sebenarnya tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat pada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya. Sebagaimana ayang telah kita ketahui bahwa salah satu kriteria dari administrasi seabgai suatu ilmu pengetahuan adalah efektivitas yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kriteria lainnya yaitu rasionalitas dan efisiensi.

Menurut Makmur (2015,7-8) untuk mengukur efektivitas program, dapat menggunakan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ketetapan penentuan waktu.

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan atau suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Seluas jelas saja sudah ada target yang harus dikejar. Dengan penentuan yang waktu yang tepat pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Seluas telah menetapkan bahwa waktu yang diperlukan untuk mendata calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 1 bulan, dan pendataan tersebut dilakukan oleh ketua RT dari masing-masing dusun. Kemudian setelah mendata ada yang namanya selsksi calon KPM, dan lama waktu yang diperlukan juga adalah 1 bulan. jadi total waktu yang ditargetkan untuk memilih benar calon KPM sesuai kriteria ada 2 bulan lamanya. Dengan lama waktu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak mengulur-ngulur waktu yang ada sampai pada bulan ketiga yaitu tahap pembagian BLT-DD.

b. Ketepatan perhitungan biaya.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun kegiatan yang melekat pada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat selesai. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut.

Perhitungan yang dimaksud adalah bagaimana Pemerintah Desa Seluas mengelola dengan benar dana yang dengan jumlah yang ada untuk membantu warganya yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Pada tahun 2021 warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada sebanyak 160 KPM, dengan jumlah Dana Desa yang diperuntukan untuk BLT-DD sebesar Rp. 576.000.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta). Dana tersebut sudah harus sesuai dengan jumlah KPM yang terdata, karena jika ada penambahan KPM baru, dana yang ada tidak mencukupi.

c. Ketepatan dalam pengukuran.

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab manusia dalam organisasi.

Dalam menjalankan sebuah program pasti ada yang namanya ukuran untuk keberhasilan program itu sendiri. Seperti program BLT-DD yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Desa Seluas pasti memiliki ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan yang diharapkan oleh Pemerintah Desa Seluas yaitu warga masyarakatnya terbantu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik.

Dalam memilih kriteria calon KPM, pemerintah Desa Seluas telah menetapkan beberapa kriteria yang masuk dalam KPM yang layak mendapatkan BLT-DD. Kriteria tersebut yang pertama keluarga miskin yang ditinggal menetap di desa Seluas, kedua kehilangan mata pencaharian atau di PHK akibat dampak covid-19, ketiga mempunyai keluarga yang dalam sakit keras dan menahun, keempat lansia, lansia janda yang sudah tidak lagi produktif dalam bekerja.

e. Ketepatan berfikir.

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

Dalam melakukan kegiatan Program BLT-DD yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Seluas dalam membantu warga Desa Seluas yang terdampak Covid-19 dengan kondisi ekonomi yang semakin menurun karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya Pemerintah Desa Seluas harus berfikir untuk bisa lebih lagi membantu warganya dalam keadaan yang sesulit itu. Yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Seluas dalam menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini adalah (1) dengan memberdayakan perangkat desa dan Lembaga desa terutama ketua RT setempat untuk menghimpun, dan mendapatkan data yang akurat. (2) menampung masukan sebagai pihak. (3) mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Sehingga apa yang dilakukan dan dikerjakn akan mendapatkan hasil yang baik.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami bawahannya. Jika perintah yang diberikan kepada bawahannya tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan.

Dalam menjalankan program BLT-DD, Kepala Desa Seluas berhak untuk memberikan perintah kepada para aparatur desa untuk menjalankan perintah yang sudah diperintahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Sosial. Sesuai dengan apa saja syarat dan kriteria yang sudah ditentukan dalam menentukan calon KPM. Dalam hal ini siapa saja yang ditunjuk untuk mendata calon KPM harus benar-benar melihat kriteria calon KPM yang sudah didata. Terutama tugas ketua RT dalam hal ini yang diutus langsung kelapangan dalam mendata sekaligus mensurvey warganya yang dianggap layak mendapatkan bantuan. Karena jika salah mendata

akan berakibat kedengkian antara masyarakat yang seharusnya mendapat namun tidak terdata.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

Tujuan diadakannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19 dalam segi ekonomi terutama kebutuhan pokok pangan. Karena dampak pandemi bisa dikatakan sangat merusak perekonomian, banyak yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karenanya. Di Desa Seluas sendiri Pemerintah Desa Seluas memberikan bantuan ini dengan tujuan membantu masyarakat Desa Seluas yang sama sekali tidak ada penghasilan saat penademi akibat kehilangan mata pencaharian dengan tujuan yaitu uang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dengan memenuhi kebutuhan pokok pangan keluarganya.

h. Ketepatan sasaran.

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Dengan adanya sasaran berarti ada tujuan yang ingin dituju, begitu halnya dengan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Seluas pasti sudah memiliki sasaran siapa saja yang dipilih sebagai penerima manfaat. Hal tersebut tentu saja sudah ada target sebelum mendata ke lapangan, kemudian untuk memperkuat data dilakukanlah survey lapangan yang dijalankan oleh ketua RT dari masing masing RT yang ada di Desa Seluas.

2.1.3. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah konsep yang bersifat multimedia dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun belum ada yang menyepakati dalam satu definisi yang sama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting.

Konsep kemiskinan dapat dibedakan kedalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Menurut Edi Suharto (2007,142) tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat dimensi utrama, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui batas kemiskinan atau garis kemiskinan (*poverty line*), baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut biasanya dikonversikan dalam bentuk uang

(pendapatan atau pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan “kondisi umum” suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 30.000 per kapita per bulan, seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 75.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 100.000, maka relatif orang tersebut dikatakan miskin.

Ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (*modernisasi*). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs for achievement*), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa karakteristik yang menandai kemiskinan kultural.

Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Proses dan praktik monopoli, oligopoli dalam bidang ekonomi misalnya, melahirkan mata rantai pemiskinan yang sulit dipatahkan. Sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktural demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya, karena aset yang ada serta akses terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang

tertentu. Para petani tidak memiliki tanah sendiri atau hanya memiliki hanya sedikit tanah, para pekerja yang tidak terampil (*unskilled labour*), termasuk ke dalam mereka yang berada dalam kemiskinan struktural.

Oscar Lewis (2006) menyebutkan dalam kumpulan makalahnya bahwa kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun, lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi seperti berikut:

1. Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan.
2. Tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil.
3. Rendahnya upah buruh.
4. Tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah, meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politik secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah.
5. Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral.
6. Kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya. Membahas konsep mengenai kemiskinan tidak terlepas dari perdebatan panjang soal definisi, indikator dan segala hal yang terkait dengan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, banyak

terminologi mengenai kemiskinan yang dikemukakan oleh pakar secara individu maupun secara kelembagaan.

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah program dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah yang dilakukan secara terencana, bersinergi dan sistematis dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi merupakan wadah koordinasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan guna melakukan pemenuhan hak dasar, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, dan pengurangan beban hidup.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan penguatan dan akses ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

2.2. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak di capai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu

kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E.Kas (dalam Sugiyono) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan menurut William N. Dunn (2005,498) efektivitas (*effectiveness*) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.

Menurut Harbani Pasolong (2012,51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk (2006,38) (dalam Harbani Pasolong, 2012,51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong 2012,51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (dalam Harbani Pasolong 2012,51)

mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.

Siagian (2010,151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Gibson (2012,119) menyatakan efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga tahapan (waktu) yakni: (1) jangka pendek yang mencakup: produksi (*productive*), efisiensi (*efficiency*), kepuasan (*satisfaction*); (2) jangka menengah mencakup: adaptasi (*adaptiveness*), pengembangan (*development*); (3) jangka panjang adalah *survive* (hidup terus), organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya bertahan hidup atau hidup terus dalam jangka panjang.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Siagian dalam Indrawijaya (2010,175), memberikan penjelasan bahwa dinilai baik tidaknya suatu pelaksanaan tugas dilihat dari proses pelaksanaannya dan juga biaya yang digunakan. Semakin dekat tujuan organisasi tujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Hasibuan menyatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit. Pernyataan tersebut cenderung mengandung efektivitas dalam tingkat efisiensi (Indrawijaya 2010,176).

Robbins dalam Indrawijaya (2010,175), bahwa “Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi berdasarkan tujuan jangka pendek(tujuan) dan jangka panjang(cara). Pemilihan mencerminkan kontribusi strategis,tingkat kehidupan organisasi, dan minat mengevaluasi”.

2.2.1 Program BLT-DD

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program jaringan pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, keuangan masyarakat serta kesehatan. Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam mensejahterakan masyarakatnya, untuk itu pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin yang belum sama sekali terjamah oleh bantuan sosial dari pemerintah. Dengan adanya program BLT-DD ini diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19, yang mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada tujuan dan prioritasnya dibuat dengan tujuan untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan,

serta meningkatkan ketahanan kelompok miskin dan rentan terhadap berbagai guncangan. Pemenuhan kebutuhan melalui Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggap sebagai perlindungan dari perlindungan sosial. Perlindungan sosial menjadi salah satu strategi dalam mencegahnya defisit selama masa pandemi covid-19, karena perlindungan sosial memiliki fungsi melindungi tingkat konsumsi dasar yang mengurangi beberapa kesulitan.

2.3. Hasil penelitian yang relevan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Vatika Sary dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial kabupaten Soppeng”. Program *Mappadeceng* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mememberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini tringulasi sumber, tringulasi teknik, dan tringulasi waktu.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng belum efektif sesuai dengan rencana, terutama dalam segi sosialisasi program yang belum maksimal hal ini dikarenakan sosialisasi ke masyarakat dan penyampaian informasinya tidak menyeluruh.

Adapun kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti efektivitas program bantuan untuk keluarga miskin, dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam kesamaan penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penulis meneliti tentang “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang” pada tahun 2021. Lokasi penelitian bertempat di Desa seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, dengan menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi data dan triangulasi sumber.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Monica Santa Crysti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura tentang “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak”. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas ketepatan sasaran Prgram Keluarga Harapan (PKH) dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Pontianak Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam kesamaan penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Pontianak Selatan belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari pencapaian tujuan PKH di Kecamatan Pontianak Utara terlihat dari pencapaian tujuan PKH terlihat dari kondisi Pendidikan setelah adanya PKH yaitu adanya pengembangan akses dan taraf pendidikan melalui bantuan tunai bersyarat tidak ada perubahan yang signifikan.

Adapun kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti efektivitas program bantuan untuk keluarga miskin. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam kesamaan penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penulis meneliti tentang “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang” pada tahun 2021. Dengan program yang Program bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLT-DD) yang diperuntukan untuk masyarakat terdampak covid-19 sebagai bentuk bantuan yang diberikan dalam membantu masyarakat miskin yang kesulitan ekonomi saat pandemi covid-19. Lokasi penelitian bertempat di Desa seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang.

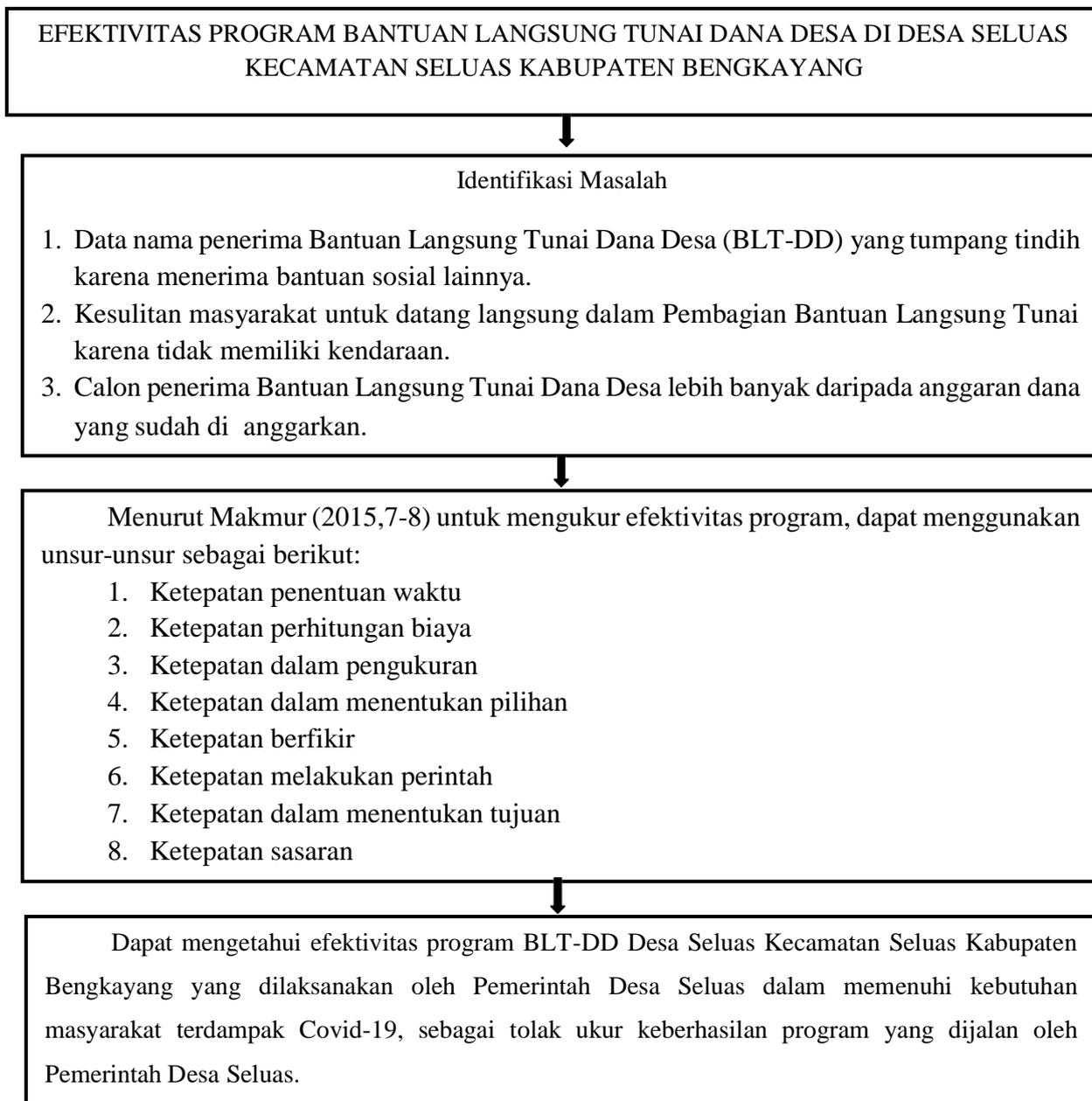
2.4. Alur Pikir Penelitian

Efektivitas program dapat dijalankan oleh kemampuan operasional di dalam menyelenggarakan program-program kerja yang selaras dengan tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu, secara komprehensif. Dari sejumlah definisi-definisi mengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Menurut Makmur (2015) efektivitas program adalah pelaksanaan sebuah kegiatan yang memperlihatkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dapat dicapai, sebagaimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu bahwa dalam rencana penelitian ini penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Makmur (2015,7-8) bahwa ada berapa unsur-unsur untuk mengukur efektivitas antara lain yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berfikir
6. Ketepatan melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

Gambar 2.1
KERANGKA TEORI



2.2. Pertanyaan Peneliti

Adapun pertanyaan peneliti yaitu:

1. Bagaimana ketepatan penentuan waktu Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang?
2. Bagaimana ketepatan perhitungan biaya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang?
3. Bagaimana ketepatan dalam pengukuran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang?
4. Bagaimana ketepatan dalam menentukan pilihan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang?
5. Bagaimana ketepatan berfikir Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang?
6. Bagaimana ketepatan melakukan perintah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang?
7. Bagaimana ketepatan dalam menentukan tujuan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang?
8. Bagaimana ketepatan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang?